

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pilot project penanggulangan kemiskinan adalah proyek uji coba yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan SKPD Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2005. Pilot project penanggulangan kemiskinan dilakukan di dua Kecamatan di Kabupaten Sleman yaitu Kecamatan Seyegan dan Kecamatan Prambanan, karena dua Kecamatan ini yang memiliki angka kemiskinan paling tinggi di Kabupaen Sleman.

Dalam konteks kesiapan pelaksanaan, dibentuklah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang bertujuan untuk merencanakan program dan mekanisme kegiatan yang akan dilakukan saat pelaksanaan program. Setelah TKPKD di bentuk kemudian di bentuklah tim penanggulangan kemiskinan Kecamatan sebagai pelaksana program dan selanjutnya di bentuk TPK Desa dan padukuhan dibantu pihak-pihak swasta dan instansi-instansi pendukung yang telah di tunjuk dalam SKPD Pemerintah Kabupaten Sleman.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Sleman membagi

masyarakat dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Ketiga klaster ini mewakili tiga tingkatan warga miskin yaitu sangat miskin, miskin dan hampir miskin. Tujuan ini di laksanakan agar nantinya masyarakat miskin yang berada di klaster ke dua dan ketiga tidak jatuh pada klaster pertama yaitu masyarakat sangat miskin. Di sini Pemerintah Kabupaten Sleman berupaya untuk menyentuh semua sektor masyarakat agar tidak terjerumus pada jurang kemiskinan.

Dari hasil penelitian dilapangan menunjukkan bahwa implementasi pilot project penanggulangan kemiskinan di Desa Margoluwih pada tahun 2009 bisa dikatakan belum berhasil dalam pelaksanaannya, karena aspek-aspek yang berperan dalam pelaksanaan program belum terorganisir dengan baik dan juga program-program yang di buat masih terfokus pada klaster pertama yaitu bantuan dan perlindungan sosial. Sedangkan fokus utama Pemerintah Kabupaten Sleman dalam Pilot Project ini adalah pemberdayaan masyarakat, namun dalam pelaksanaannya program pemberdayaan masyarakat di Desa Margoluwih hanya mendapat proporsi yang sedikit dalam pelaksanaan program sehingga masyarakat di Desa Margoluwih lebih cenderung berupaya untuk masuk kedalam kelaster pertama yaitu masyarakat sangat miskin.

Dari data Pemerintah Kecamatan Seyegan, jumlah warga miskin di Desa Margoluwih dari tahun 2009 hingga tahun 2010 mengalami peningkatan yaitu 2.268 menjadi 2.367 jiwa, ini menandakan bahwa pelaksanaan program-program

11 | *Uji Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan di Desa Margoluwih bisa*

dikatakan belum berhasil, dan program-program yang di buat hanya bersifat sementara.

Namun dalam melaksanakan program tentunya selalu ada faktor pendukung dan penghambat, adapun faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Desa Margoluwih adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor pendukung:

- Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Desa Margoluwih di dukung dana yang memadai.
- Adanya wewenang yang di berikan kepada pelaksana program dalam hal kegiatan program, meskipun aparat pelaksana program tidak di beri wewenang dalam mengelola dana program.
- Diberikannya fasilitas pendukung kepada aparat pelaksana.
- Personil yang dipilih dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan memiliki kedekatan yang baik dengan masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan lain-lain.
- Insentif di berikan kepada aparat pelaksana agar kinerja yang dilakukan semakin baik meskiun insentif yang di berikan tidak terlalu besar.

4.1.1.1. Faktor-faktor pendukung (SOP) yang di buat oleh pemerintah

2. Faktor-faktor penghambat:

- Aparat pelaksanaan program tidak memiliki kompetensi yang baik karena faktor pendidikan aparat pelaksana yang di pilih mayoritas berpendidikan SMA.
- Tidak adanya koordinasi yang dilakukan antara dinas-dinas pendukung dengan TPK Kecamatan Seyegan.
- Sosialisasi yang dilakukan pihak penyelenggara program sulit dipahami oleh masyarakat karena faktor pendidikan masyarakat sehingga bahasa-bahasa yang digunakan oleh pihak pelaksana program dalam melakukan sosialisasi program harus menggunakan bahasa yang ringan dan mudah dipahami masyarakat.
- Kurangnya pemahaman tugas yang akan dilaksanakan oleh TPK Kecamatan maupun TPK Desa menjadi kendala tersendiri sehingga pelaksana program slalu kesulitan dalam melakukan sosialisasi program kepada masyarakat Desa Margoluwih.
- Meskipun SOP di buat, namun dalam pelaksanaannya alur yang di laksanakan tidak sesuai dengan SOP penanggulangan kemiskinan Kabupaten Sleman.
- Aktor pelaksana program membutuhkan perubahan system kinerja dalam pelaksanaan program agar program-program yang di buat memiliki anggota yang kusus dalam penanggulangan kemiskinan, jadi pekerjaan

dipertanggung jawabkan dalam artikata Pemerintah Desa tidak memiliki laporan audit dana program yang telah dilaksanakan di Desa Margoluwih.

6. Komitmen harus ditanamkan pada aparat pelaksana program agar aparat bekerja dengan maksimal, karena jika aparat pelaksan tidak memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan sebuah program, maka program yang dilaksanakan akan tidak terorganisir dengan baik.
7. Sistem kinerja dalam pelaksanaan program harus memiliki anggota-anggota yang kusus dalam penanggulangan kemiskinan terutama di Kecamatan Seyegan, agar pemahaman aparat pelaksana akan mekanisme pelaksanaan program lebih baik dan koordinasi antara aparat pelaksana